

Tantangan dan Problematika Pendidikan Sejarah

Challenges and Problems of History Education

Yudi Pratama ¹,

Universitas Negeri Malang

pratamayudi@fis.um.ac.id¹

Moh Puadi ²,

STAI Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya

mohpuadi@gmail.com

Mukhlis ³,

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

mukhlisrais80@gmail.com

**EDUCATE : Journal of
Education and Culture**

**Vol. 02 Nomor. 03
ISSN-e: 2985-7988**

Naskah diterima: 15-08-2024
Naskah disetujui: 30-09-2024

Terbit: 30-09-2024

Abstract: *This paper elaborated the education of history and his problems in Indonesia. There are some problems in the education of history in Indonesia. Beside the educational curriculum has been always changed, as few as learned matter, and problem of historical learning in classroom in which the education of history was considered as a wearied subject matter. That one of effort to solve the last problem is historical trip, make a trip to historic sites.*

Keywords: *the educaton of history, historical trip*

Abstrak: Artikel ini menguraikan pendidikan sejarah dan permasalahannya di Indonesia. Ada beberapa masalah dalam pendidikan sejarah di Indonesia. Selain itu kurikulum pendidikan selalu berubah, sesedikit materi yang dipelajari, dan masalah pembelajaran sejarah di kelas di mana pendidikan sejarah dianggap sebagai materi pelajaran yang lelah. Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah terakhir adalah perjalanan sejarah, melakukan perjalanan ke situs bersejarah.

Kata Kunci : pendidikan sejarah, perjalanan sejarah, Problematika.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses belajar-mengajar agar-orang dapat berfikir secara arif dan lebih bijaksana. Oleh sebab itu pendidikan merupakan sarana terpenting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Demikian pula halnya dengan pendidikan sejarah. Sebagai sarana pendidikan, pengajaran sejarah termasuk pengajaran normatif, karena tujuan dan sasarannya lebih ditujukan pada segi - segi normatif yaitu segi nilai dan makna yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sejarah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia umumnya. Agaknya pernyataan tersebut tidaklah terlalu berlebihan. Namun sampai dengan saat ini masih terus dipertanyakan keberhasilannya, mengingat fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia khususnya para generasi muda makin

hari makin diragukan eksistensinya. Dengan kenyataan tersebut artinya ada sesuatu yang harus dibenahi dalam pelaksanaan pendidikan sejarah. Menurut Garvey dan Krug dalam Hamid Hasan, terdapat lima tujuan yang harus dicapai oleh pengajaran sejarah, antara lain; 1) menambah pengetahuan mengenai fakta-fakta sejarah, 2) menambah dan memberikan apresiasi terhadap peristiwa-peristiwa sejarah, 3) mendapatkan kemampuan menilai dan mengkritik tulisan-tulisan sejarah, 4) mempelajari teknik-teknik penelitian sejarah, 5) mempelajari cara penulisan sejarah (Hasan, 1991). Setiap tujuan memiliki sifat yang berbeda-beda.

Pemahaman sejarah mutlak diperlukan guna mencapai tujuan dari pembelajaran. Ada adagium, bahwa sejarah membuat seseorang menjadi lebih arif dan bijaksana dalam bertindak. Sejarah mengajarkan manusia bagaimana belajar dari masa lalu untuk melakukan perubahan kearah

yang lebih baik di masa depan kelak. Bangsa yang tidak mengetahui sejarah akan mudah dikelabui (Rowse, 2014)

Beberapa pakar pendidikan sejarah maupun sejarawan memberikan pendapat tentang fenomena pembelajaran sejarah yang terjadi di Indonesia. Prof. Hamid Hasan misalnya, menjelaskan bahwa kenyataan yang ada sekarang, model pengajaran sejarah jauh dari harapan untuk memungkinkan anak melihat relevansinya dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Mulai dari jenjang SD hingga SLTA, pendidikan sejarah cenderung hanya memanfaatkan fakta sejarah sebagai materi utama. Tidak aneh bila pendidikan disini terasa kering, tidak menarik, dan tidak memberi kesempatan kepada anak didik untuk belajar menggali makna dari sebuah peristiwa sejarah (Hasan, 1994).

Strategi Pedagogis Pendidikan Sejarah

Pendidikan sejarah adalah suatu wahana penting dalam pendidikan suatu bangsa. Suatu kenyataan yang tidak dapat dimungkiri banyak negara di dunia ini yang menempatkan pendidikan sejarah sebagai unsur penting dalam pendidikan kebangsaan mereka. Hal ini disebabkan karena adanya keyakinan bahwa materi pendidikan sejarah mampu mengembangkan sifat dan karakter generasi muda bangsa.

Pendidikan sejarah dapat menanamkan pada diri siswa pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai mengenai proses perkembangan masyarakat Indonesia, dan dunia dari masa lampau hingga kini. Tidak diragukan lagi bahwa sejarah

merupakan ilmu pengetahuan yang sangat diperlukan untuk pendidikan manusia seutuhnya (Kochar, 2008). Taufik Abdullah memberi penilaian, bahwa strategi pedagogis Sejarah Indonesia sangat lemah. Pendidikan sejarah di sekolah masih berkuat pada pendekatan *cronicle* dan cenderung menuntut anak agar menghafal sesuatu peristiwa. Siswa tidak dibiasakan untuk mengartikan suatu peristiwa guna memahami dinamika suatu perubahan. Untuk siswa sekolah menengah, sejarah harusnya menjadi alat untuk memahami segala macam peristiwa yang terjadi. Mereka sudah seharusnya dibiasakan berdialog dengan lingkungan, memilih-milih persoalan yang ada, sehingga mereka biasa memahami adanya dinamika dari suatu perubahan. (Abdullah, 1996).

Berbicara tentang strategi pedagogis sejarah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai. Salah satu komponen yang menjadi acuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut adalah kurikulum. Artinya kurikulum menjadi acuan strategi pedagogis, agar cita-cita mencerdaskan

kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 dapat terwujud.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah rencana tertulis dan dilaksanakan dalam suatu proses pendidikan guna mengembangkan potensi peserta didik menjadi berkualitas. Dalam sebuah kurikulum termuat berbagai komponen seperti, tujuan, konten dan organisasi konten, proses yang menggambarkan posisi peserta didik dalam belajar dan asesmen hasil belajar. Selain komponen tersebut, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dapat pula berisikan sumber belajar dan peralatan belajar dan evaluasi kurikulum atau program. (Hasan, 2006)

Sejak Indonesia merdeka, telah beberapa kali terjadi perubahan kurikulum dan mata pelajaran sejarah berada di dalamnya. Akan tetapi materi-materi yang diberikan dalam kurikulum sering mendapat kritik dari masyarakat maupun para pemerhati sejarah baik dari pemilihannya, teori pengembangannya dan implementasinya yang seringkali digunakan untuk mendukung kekuasaan.

Beberapa Permasalahan Pendidikan Sejarah

Ketika Orde Baru bermaksud menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk mendukung maksud tersebut. Tentu saja kurikulum sekolah dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum 1968 yang berlaku pada awal masa Orde baru kemudian mengalami pergantian menjadi kurikulum 1975, kurikulum sejarah juga mengalami penyempurnaan. Demikian seterusnya terjadi beberapa kali perubahan kurikulum menjadi kurikulum 1984, 1994 dan 2004 (yang akhir-akhir ini sempat diperbincangkan). (Umasih, 2006)

Selain masalah kurikulum yang selalu mengalami perubahan, masalah yang tak kalah pentingnya adalah masalah buku ajar atau buku teks. Menurut prof. R.Z. Leirissa (Leirissa, 2006), masalah buku ajar ini sudah ada sejak system pendidikan nasional mulai diterapkan di Indonesia tahun 1946. Saat itu buku ajar yang dipakai sebagai bahan ajar sejarah adalah karangan Sanusi Pane yang berjudul *Sejarah Indonesia* (4jilid) yang ditulis atas permintaan pihak Jepang pada tahun 1943-1944; yang kemudian dicetak ulang pada tahun 1946 dan 1950. Suatu hal yang menarik adalah, dalam buku tersebut tidak ada bagian mengenai Sejarah Pergerakan Nasional. Bagian ini kemudian baru ditambahkan pada terbitan tahun 1950. Pada tahun 1957 Anwar Sanusi menulis buku *Sejarah Indonesia Untuk Sekolah Menengah* (3jilid).

Setelah itu kemudian muncul berbagai buku ajar lainnya yang ditulis oleh berbagai pihak, terutama oleh para guru, salah satunya buku yang dikarang oleh Subantardjo.

Pada tahun 1970, para ahli sejarah yang terhimpun dalam Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) mengadakan "Seminar Sejarah II" di Yogyakarta. Dalam seminar yang dihadiri oleh para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia itu telah menghasilkan suatu keputusan untuk menulis buku sejarah, untuk keperluan perguruan tinggi dan bisa dijadikan sumber untuk buku ajar di SMP dan SMA. Setelah restu dari menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka dibentuklah "Panitia Penyusun Buku Standar Sejarah Indonesia" dengan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo sebagai ketua.

Buku yang terdiri dari 6 jilid itu, kemudian juga tak luput dari permasalahan dan sempat memunculkan pertentangan. Menurut Prof. Leirissa (2006) sebab utamanya adalah masalah metodologis. Tidak semua penulis menggunakan metodologi yang sama yang telah ditentukan editor umum, Prof. Sartono Kartodirdjo (pendekatan structural); masing-masing penulis membawa tradisi ilmiah yang telah melekat pada dirinya (structural atau naratif/kisah). Pada masa itu perbedaan antara pendekatan structural dan pendekatan naratif secara metodologis tidak bisa dijumpai sama sekali. Masing-masing memiliki domain atau kavelingnya sendiri-sendiri. Konflik yang berkepanjangan ini menyebabkan Prof. Sartono mengundurkan diri (kemudian diikuti oleh penulis-penulis lainnya, termasuk dari LIPI). Setelah buku tersebut dicetak ulang (1983 - 1984) sebagai editor umum hanya tercantum nama Prof. Dr. Nugroho Notosusanto dan Prof. Dr. Marwati Djoened Poesponegoro.

Setelah Prof. Nugroho meninggal dunia tahun 1985, menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Prof. Dr. Fuad Hasan mengambil keputusan untuk tidak lagi menggunakan buku Sejarah Nasional Indonesia yang enam jilid itu dan tidak mencetak ulang buku tersebut. Sebagai gantinya, setiap ahli sejarah, termasuk guru sejarah dibolehkan menulis buku sejarah untuk digunakan di SMP dan SMA. Para ahli sejarah diminta pengertiannya untuk tidak lagi meneruskan konflik mengenai buku "standar" yang ada. Dengan demikian, perbedaan paham yang muncul sejak tahun 1970-an tersebut sudah mereda sampai sekarang (Leirissa, 2006).

Kemudian salah satu rekomendasi Kongres Masyarakat Sejarawan Indonesia (saat itu tidak lagi menggunakan istilah Seminar) yang berlangsung di Jakarta pada bulan November 2001 adalah menulis buku Sejarah Indonesia. Buku yang terdiri dari 8 jilid itu sampai saat itu masih belum rampung, masih menunggu beberapa tulisan yang belum masuk. Diharapkan

pada akhir tahun ini buku tersebut dapat diterbitkan. Dua orang editor umum (Prof. Dr. Taufik Abdullah dan Prof. Dr. A. B. Lopian) menentukan gerak kerja dan isi buku tersebut. Apakah buku yang akan terbit itu bisa memenuhi kebutuhan buku ajar, mungkin memerlukan diskusi yang panjang.

Ada beberapa perbedaan yang tampak dari isi buku tersebut. Buku Sejarah Indonesia yang akan terbit ini, mirip dengan sebuah ensiklopedia sejarah. Sebab setiap jilid terdiri dari sejumlah artikel yang ditulis oleh sejumlah orang; kaitannya hanya ditentukan oleh periode. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan kalau para penulis buku tersebut berjumlah lebih dari 70 orang. Setiap artikel akan dicantumkan nama penulisnya, sehingga setiap penulis bertanggung jawab atas isi dan metodologi yang digunakannya.

Masalah lainnya yang juga penting dalam pembelajaran sejarah adalah mengenai sistem pengajaran. Bagaimana guru dapat menyajikan materi sehingga dapat menarik minat siswa untuk mempelajarinya. Mengingat materi pelajaran sejarah pada umumnya menyangkut kehidupan manusia pada masa lalu, guru dituntut untuk dapat mengemas materi pelajaran sejarah dengan baik dan menyenangkan, misalnya dengan cara mengunjungi obyek-obyekinggalan sejarah. Berbagai bentuk peninggalan sejarah yang ada di Indonesia dapat dijadikan sumber sejarah (sumber benda selain sumber tertulis dan sumber lisan), dapat berupa bangunan-bangunan bersejarah, candi, monument dan sebagainya.

Terdapat adagium yang mengatakan, bahwa sejarah ditulis oleh para penguasa. Hal tersebut menyebabkan banyaknya interpretasi atas suatu peristiwa sejarah. Pendidikan sejarah tidak terlepas dari persoalan multidimensional tersebut. Di dalam diktat yang ditulis oleh Hamid Hassan, dijabarkan bahwa perkembangan pendidikan sejarah tidak terlepas dari situasi politik yang terjadi. Di masa awal kemerdekaan hingga kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia pada 1949, penulisan sejarah diwarnai dengan semangat anti-penjajahan. Sejarah bangsa Indonesia ditulis dengan sejarah penindasan kolonial.

Begitu pula pada masa Pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Sukarno, narasi sejarah kembali berubah. Ketika kolonialisme berhasil dihancurkan, segala unsur-unsur yang berunsur kolonialisme dipersalahkan, antara lain Pemerintahan RIS yang merupakan gabungan Indonesia-Belanda (baca: RIS), kemudian pemerintahan bergaya parlementer yang dianggap sangat liberal. Semua hal tersebut dianggap sebuah noda hitam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Saat Orde Baru berkuasa, kembali terjadi perubahan narasi sejarah. Sejarah Orde Baru menuliskan segala

sesuatu yang ada pada Orde Lama adalah kesalahan sejarah. Terakhir ialah ketika Orde Baru tumbang berganti rezim reformasi, sejarah Orde Baru dinafikan, Orde Baru dianggap melakukan control terhadap alur sejarah bangsa Indonesia.

Sudah bukan rahasia lagi, bahwa Sejarah merupakan mata pelajaran yang tidak menarik, membosankan, sulit dan lain-lain yang menunjukkan sebenarnya siswa tidak menyukai pelajaran itu. Keadaan ini dapat diperparah jika guru yang mengajarkannya monoton, terlalu teoretis, dan abstrak, kurangnya buku ajar, ditambah kurikulum yang selalu berubah. Sementara misi yang diembannya begitu penting. Suatu hal yang sangat ironis.

Upaya Menghidupkan Pendidikan Sejarah

Direktorat Nilai Sejarah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sejak tahun 2003 (dulu Asdep Sejarah Nasional) mengadakan kegiatan Lawatan Sejarah Tingkat Nasional (Lasenas) dengan mengajak siswa-siswi terbaik tingkat SMU dan guru-guru sejarah seluruh Indonesia untuk mengunjungi situs-situs atau tinggalan-tinggalan sejarah di berbagai daerah secara bergiliran setiap tahunnya dengan tema-tema tertentu. Pada tahun 2007 ini, merupakan Lawatan Sejarah V yang akan diadakan di Sumatera Barat dengan mengambil tema "Peranan Masyarakat Sumatera Barat Dalam Menyelamatkan NKRI". Peserta Lasenas akan menyusuri jejak-jejak perjalanan para pemimpin PDRI di daerah Sumatera Barat.

Lawatan Sejarah I diadakan di pulau Jawa dengan mengunjungi tempat-tempat pengasingan/makam pejuang dari luar pulau Jawa seperti tempat pengasingan dan makam Cut Nyak Dien di Sumedang, tempat pengasingan Hattadi Sukabumi, makam Karaeng Galesong di Ngantung, Malang dsb. Lawatan Sejarah II (2004) diadakan di Aceh sampai pulau Sabang dengan tema "Dari Titik Nol Kilometer Sabang Merajut simpul-simpul Keindonesiaan". Sementara Lawatan Sejarah III (2005) di Makasar sampai pulau Selayar dengan merajut simpul-simpul maritime. Tahun lalu, 2006 diadakan di pulau Bangka-Belitung dengan tema "Pangkal Pinang Kota Pangkal Kemenangan" dengan mengunjungi tempat-tempat pengasingan Sukarno dan Hatta dan tempat-tempat bersejarah lainnya.

Program Lawatan Sejarah ini merupakan salah satu bentuk kegiatan agar pembelajaran sejarah dilakukan secara menyenangkan dan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Fokus kunjungan adalah situs-situs bersejarah yang merupakan orientasi nilai-nilai perjuangan dan persatuan untuk memperkokoh integrasi bangsa. Paling tidak ada tiga aspek yang melekat pada Lawatan Sejarah yakni: edukatif, inspiratif dan rekreatif. Sejarah itu sendiri memiliki nilai edukatif yang dapat memberikan wawasan yang sifatnya

mendidik, seperti ungkapan "belajarlah dari sejarah" atau "...sejarah telah mengajarkan kepada kita " Dsb.

Hasil yang diharapkan dari kata-kata tersebut adalah *wisdom* yakni kearifan atau kebijakan. Tentu akan menyenangkan bila belajar sejarah dilakukan dengan berekreasi dan melihat sendiri tinggalan-tinggalan yang ada. Sementara, sejarah juga akan memberikan inspirasi bagi para siswa sehingga dapat menggerakkan sikap dan perilaku yang berbekal nilai-nilai sejarah dan perjuangan, seperti cinta tanah air, rela berkorban, sikap solidaritas dan semangat persatuan.

Tentu butuh waktu yang tidak sedikit guna mengentaskan problematika yang terdapat dalam pelaksanaan pendidikan sejarah di tingkat SMA, terutama di Kota Depok. Selain kependaiandalan teknik pembelajaran, penguasaan terhadap pendidikan sejarah secara utuh (baca: filosofi, posisi, dan tujuan pendidikan sejarah) perlu diwujudkan wajib dimiliki oleh Guru Sejarah SMA Kota Depok. Guru Sejarah harus memulai membuka pikirannya, dan kembali berusaha untuk belajar, karena semua itu demi tercapainya tujuan daripada pendidikan sejarah. Jika Guru sejarah sudah mau membuka dirinya, memperbaiki dirinya, ketiga problematika yang terpaparkan di atas bisa dihindari.

Kembali kepada "Rel" Pendidikan Sejarah yang Sebenarnya

Selama ini pendidikan sejarah sering dipandang sebelah mata oleh khalayak banyak. Terutama menyoal pembelajaran sejarah yang sebenarnya merupakan implementasi dari pendidikan sejarah. Sejarah sebagai mata pelajaran diremehkan, dianggap tidak populer, dan dirasa kurang memberikan manfaat bagi kehidupan. Pandangan buruk khalayak banyak terhadap pendidikan sejarah tidak bisa disalahkan. Pemahaman buruk mereka tentu tidak muncul dengan sendirinya, melainkan terjadi atas dasar pengalaman yang mereka miliki, yang mungkin dari pendidikan sejarah yang pernah mereka terima. Menurut Kotler, persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti (Philip Kotler, 2009).

Persepsi buruk khalayak umum akan sejarah, pembelajaran sejarah, dan pendidikan sejarah harus dihilangkan. Pendidikan sejarah mutlak perlu diberikan kepada siswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Menurut Guru Besar Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta, Diana Nomida "Bilamana suatu bangsa tidak lagi menghargai sejarahnya, maka dapat dipastikan cepat atau lambat bangsa tersebut akan terjerumus dalam kehancuran." Oleh karena itu, maka pendidikan sejarah harus kembali kepada "rel" yang sebenarnya. Dekan Pendidikan Sejarah UPI menjelaskan, bahwa pendidikan

sejarah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang sejarah perjalanan bangsa. Masih menurutnya, di dalam proses pendidikan sejarah Guru Sejarah seharusnya menjadi tangan panjang pemerintah. Guru Sejarah dilarang untuk berpihak kepada "satu versi" dalam sebuah peristiwa sejarah. Berbeda dengan sejarah sebagai sebuah keilmuan, yang membiarkan terjadinya proses dialektis antar fakta sejarah yang ditemukan. Guru Sejarah harus sadar bahwa tujuan pendidikan sejarah tidak hanya diarahkan kepada penguasaan materi secara aspek pengetahuan saja, tetapi dalam hal ini sejarah dapat memiliki relevansi dengan kehidupan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1996. "Strategi Pedagogis Sejarah Indonesia Lemah", Kompas, 8 November.
- . 1996. "Di Sekitar Pengajaran Sejarah Yang Reflektif Dan Inspiratif" dalam *SEJARAH NO. 6*, Jakarta: MSI bekerjasama dengan P.T Gramedia Pustaka Utama.
- . 2001. *Nasionalisme dan Sejarah*, Bandung: Satya Historika.
- Alfian, Magdalia. 2006. "Sejarah Sebagai Perikat Bangsa", makalah yang disampaikan pada Rapat Sinkronisasi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Tanjung Pinang, 17-18 September.
- . 2006. "Pendidikan Sejarah Memperkokoh Jati Diri Bangsa", makalah yang disampaikan pada Sarasehan Guru Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial-Budaya di Propinsi NAD, 22-23 November.
- Mulyana, Agus. 2006. "Dari Perkebunan Hingga Stasiun: Pengembangan Materi Dalam Pembelajaran Sejarah", disampaikan pada Musyawarah Kerja Nasional Pengajaran Sejarah, yang diadakan oleh Direktorat Nilai Sejarah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Surabaya, 11-13 Juli.
- Leirissa, R.Z. 2006. "Masalah Buku Ajar", disampaikan pada Mukernas Pengajaran Sejarah, yang diadakan oleh Direktorat Nilai Sejarah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Surabaya, 11-13 Juli.
- Said, Hamid Hasan. 1994. "Kurikulum Sejarah 1994: Pengertian, Landasan, Pemikiran dan Konsekuensi", makalah pada Seminar di Jurusan Pendidikan Sejarah, 23 September, FPIPS IKIP Bandung.
- Said, Hamid Hasan. 1998. "Kebijakan dan Pelaksanaan Sejarah Di Lingkungan Depdikbud" dalam *Simposium Pengajaran Sejarah (Kumpulan Makalah)*. Jakarta : Depdikbud.
- Sufi, Rusdi. 2006. "Pengajaran Sejarah Hubungannya Dengan Kesadaran Bernegara", makalah yang disampaikan pada Sarasehan Guru Bidang Ilmu Sejarah dan Ilmu Sosial-Budaya di provinsi NAD, 22-23 November.